

## ABSTRAK

### PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PEMBANGUNAN PERUMAHAN DALAM KAITANNYA HUKUM BERTETANGGA

Manusia adalah makhluk sosial, kehidupan bermasyarakat mutlak diperlukan adanya kaidah hukum, yaitu untuk mencapai masyarakat yang tertib, yang bertujuan untuk mengatur bagaimana orang-orang memperoleh penghidupan yang memuaskan baik materiel, spiritual maupun kesusilaannya.

Untuk tercapainya suasana hidup yang rukun antar tetangga dapat terwujud dan terpelihara secara langgeng harus memperhatikan kepentingan masyarakat, sesuai dengan prinsip sosial.

Didalam pelaksanaan pembangunan perumahan ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati apa yang telah disahkan dalam gambar terlampir, baik terhadap syarat-syarat teknis maupun syarat-syarat administratif dan mentaati ketentuan-ketentuan yang di syaratkan didalam IMB. agar tidak terjadi persengketaan.

Peristiwa persengketaan dalam pembangunan perumahan pada kaitannya dengan hukum bertetangga bisa kita jumpai pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2012/PN.PTK. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan pembangunan perumahan dalam kaitannya dengan hukum bertetangga dan bagaimana akibat hukum serta bagaimana cara penyelesaian atas perbuatan melawan hukum dalam pembangunan perumahan yang kaitannya dengan hukum bertetangga.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Socio Legal*. Pendekatan tetap dalam ranah hukum, hanya perpektifnya yang berbeda. Jenis data yg digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian kasus gugatan perbuatan melawan hukum atas pembangunan perumahan dikarenakan pihak pembangun perumahan atau pengembang tidak menaati ketentuan yang disahkan dalam gambar terlampir, baik terhadap syarat-syarat teknis maupun syarat-syarat administratif dan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan didalam IMB.

Saran : Pemerintah harus menegaskan dalam peraturan yang sifatnya lebih khusus (*lex specialist*) mengenai klasifikasi perbuatan yang dapat merugikan pihak-pihak didalam pembangunan perumahan khususnya masyarakat sekitar. Dinas Tata Kota harus berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembang perumahan, harus memperdalam bagaimana resiko yang terjadi apabila tidak menaati syarat-syarat teknis maupun syarat-syarat administratif dan yang termuat di dalam IMB

Kata Kunci : *Perbuatan Melawan Hukum, Pembangunan Perumahan, Hukum Bertetangga*

## **ABSTRACT**

### **TORT THE HOUSING DEVELOPMENT RESPECT THE LAW NEIGHBORS**

Humans are social beings, social life is absolutely necessary for the rule of law, namely to achieve an orderly society, which aims to regulate how people obtain a satisfactory livelihood good material, spiritual and kesusilaannya.

To achieve a harmonious living atmosphere between neighbors can be realized and maintained in perpetuity must consider the interests of society, in accordance with the social principles.

In the implementation of housing construction there are provisions that must be adhered to what was approved in the attached picture, both the technical requirements and administrative requirements and comply with the provisions in otherwise require in the IMB. To avoid disputes.

Events disputes in the construction of housing in relation to neighboring law can be encountered in Pontianak District Court in Decision No. 109 / Pdt.G / 2012 / PN.PTK.

Problems in this study can be formulated as follows:

How is the implementation of a housing development in relation to neighboring law and how the legal consequences seta how the settlement of a tort in the construction of housing that connection with neighboring law.

This study uses the Socio Legal approach. The approach remains within the realm of law, only perpektifnya different. The type of data that is used in this research is secondary data and primary data. The analysis used in this research is the analysis of qualitative data.

Research results tort litigation case on the construction of residential housing due to the builder or developer does not comply with the provisions enacted in the attached picture, both the technical requirements and administrative requirements and provisions specified in the permit.

Suggestion: Government must assert in the regulations that are more specifically (lex specialist) regarding the classification of acts that could harm the parties in the local community, especially housing construction. City Planning Agency should play an active role in fostering and supervision of housing developer, should deepen how risks occur when not obey the terms of the technical and administrative requirements and contained in the IMB

*Keywords : Unlawful Deeds, Housing Development, Legal neighbors*